

PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH SEJAK PROKLAMASI KEMERDEKAAN SAMPAI ERA REFORMASI

ABD MU'ID ARIS SHOFA

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan

Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5 Malang

E-mail: arisshofa @ymail.com.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami dan mengerti nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah sejak proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi, serta mengetahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari sumber pustaka dan dokumen sehingga memperoleh suatu hasil analisis berupa argumentasi penulis. Proses penggarapan yang digunakan meliputi *heuristic*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal proklamasi kemerdekaan (Orde Lama) tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga negara yang demokratis serta membangun karakter peserta didik yang cinta pada tanah air dan punya jiwa patriot yang tinggi. Ketika Orde baru tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya. Memasuki era reformasi tujuan pendidikan nasional membentuk watak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Proklamasi Kemerdekaan, Era Reformasi

Tantangan pendidikan dewasa ini adalah untuk menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan tangguh, akan tetapi hal itu hingga saat ini

semakin berat. Pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus membentuk dan membangun sistem keyakinan dan karakter kuat setiap peserta didik sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya (Hidayatullah, 2010:2).

Keluaran pendidikan seharusnya dapat menghasilkan orang pintar dan juga orang baik dalam arti luas. Pendidikan tidak hanya menghasilkan orang pintar tetapi tidak baik, sebaliknya juga pendidikan tidak hanya menghasilkan orang baik tetapi tidak pintar. Orang yang pintar saja tetapi tidak baik akan menghasilkan orang yang berbahaya, karena dengan kepandaianya ia bisa menjadikan sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Ditengah kebangkrutan moral bangsa saat ini, maraknya berbagai tindak kekerasan, inkonsistensi politisi atau retorika politik, dan perilaku keseharian, pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis religius menjadi relevan untuk diterapkan.

Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa membawa kemunduran peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu negara. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka pendidikan karakter mutlak diperlukan.

Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak, baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah, serta masyarakat luas. Pendidikan karakter tidak akan berhasil, tanpa ada kesinambungan berbagai komponen tersebut. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter di sekolah, guru adalah sosok yang sangat dominan dalam memberikan warna pada pendidikan berbasis penanaman akhlaqul karimah tersebut. Tidak dapat dipungkiri, bahwa profesi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia. Lahirnya orang-orang besar, para cerdik cendekia, bahkan sampai kepala negara, tidak lepas dari jasa seorang guru.

Sebagai upaya menemukan formula pendidikan berbasis karakter yang jitu dan manjur, tidak ada salahnya kita berkaca ulang pada model pendidikan masa lampau, yang pernah mengalami masa keemasan di negeri ini. Model pendidikan

yang dimaksud adalah model pendidikan pada masa Orde Lama yang sangat terkenal dengan tokohnya yaitu Ki Hajar Dewantara yang juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia.

Pendidikan karakter merupakan langkah yang strategis dan penting dalam membangun kembali jati diri bangsa. Oleh karena itu, implementasi pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak diantaranya rumah tangga dan keluarga, sekolah atau lembaga pendidikan serta lingkungan masyarakat. Penerapan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan yang berperan aktif haruslah semua pihak dan harus melibatkan semua komponen (*stakeholders*). Komponen-komponen tersebut antara lain adalah isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan sekolah dan pelaksanaan aktivitas lainnya.

Bahkan sebenarnya, *platform* pendidikan karakter bangsa Indonesia telah dipelopori oleh tokoh pendidikan kita tersebut, yang tertuang dalam tiga kalimat yang berbunyi: *Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tutwuri Handayani*. (Ahmadi, 1987:56). Seiring dengan hilangnya penjajahan dari bumi Indonesia pada tahun 1945 merupakan tonggak awal bangkitnya pendidikan di Indonesia yang kita bisa ketahui melalui tiga fase yaitu: fase awal kemerdekaan (1945-1965) kita kenal dengan masa Orde Lama, masa pembangunan mulai tahun (1966-1998) kita kenal dengan masa Orde Baru dan yang terakhir adalah masa transisi mulai tahun (1998-sekarang) kita kenal dengan masa Reformasi.

Ada Sembilan pilar pendidikan karakter yang secara universal dapat disebutkan, yaitu: (1) karakter cinta kepada Tuhan dan semua makhluk ciptaan-Nya; (2) sikap kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah dan diplomatis; (4) perilaku hormat dan santun; (5) pribadi yang dermawan, suka menolong dan gotong-royong/kerjasama; (6) memiliki kepercayaan diri dan berjiwa pekerja keras; (7) berjiwa pemimpin dan adil; (8) baik hati dan redah hati; dan (9) sikap toleransi, cinta damai dan kesatuan.

Dari kesembilan pilar karakter itu, harus diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik dengan menggunakan *metode knowing the good, feeling*

the good, dan *acting the good*. *Knowing the good* bisa diajarkan dengan mudah sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah itu harus ditumbuhkan juga *feeling loving the good* yaitu bagaimana kita merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat kebaikan. Sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri, bahwa dia mau melakukan kebaikan karena dia cinta dan suka pada kebaikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka *acting the good* akan secara otomatis berubah menjadi suatu kebiasaan dalam berbuat, bersikap dan bertindak (Amri, 2011: 29).

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya bagian pertama tentang (pendidikan, cetakan ketiga 2004: 28) ada enam pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa yaitu: memberi contoh, pembiasaan (pakulinan), pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, tingkah laku, serta pengalaman lahir batin yang mencakup (ngerti, ngroso, nglakoni)

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa adalah nilai-nilai dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan atau masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter bangsa hendaknya dalam konteks pengembangan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* dengan dasar nilai-nilai yang bersumber dari agama yang dihargai oleh sesame manusia, yang tumbuh dan berkembang di lingkungan belajar dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi filosofi dan ideologi bangsa Indonesia (Akbar, 2011:8).

Dengan merujuk fenomena di atas sebagai latar belakang masalah, maka yang menjadi perhatian penulis untuk diteliti adalah: (1) Bagaimana pengertian, prinsip-prinsip dasar dan tujuan pendidikan karakter di sekolah ;(2) Bagaimana pendidikan karakter di sekolah pada masa proklamasi kemerdekaan (Orde Lama); (3) Bagaimana pendidikan karakter di sekolah pada masa Orde Baru; (4) Bagaimana pendidikan karakter di sekolah pada masa Era Reformasi; (5) Apa persamaan dan perbedaan pendidikan karakter sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai Era Reformasi.

METODE

Dengan membatasi obyek studi dan permasalahannya, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan *library research* atau penulisan berdasarkan literature atau metode kepustakaan. Maka dengan demikian penulisan karya ilmiah ini dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap buku-buku berbasis pendidikan karakter dan beberapa bahan pustaka yang relevan seperti: *Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (2011)*; *Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah (2011)*. Selain itu juga menggunakan dokumen kebijakan yang terkait dengan pendidikan.

Metode yang dipergunakan dalam mengkaji pendidikan karakter di sekolah sejak proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi ini menggunakan langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian sejarah. Menurut Hariyono (1995:109), secara sederhana penelitian sejarah dapat dijelaskan dalam beberapa langkah yaitu: *heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi*. Metode awal yang harus dilakukan *Pertama* Heuristik metode ini merupakan langkah awal dari metode historis. Heuristik merupakan suatu teknik yang membantu penulis untuk mencari jejak sejarah (Renier, 1997:113). Sedangkan menurut hariyono, heuristik merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang akan dikaji. Untuk melacak sumber tersebut, sejarawan dapat mencari dari berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, mewawancarai pelaku atau saksi sejarah melalui sejarah lisan (hariyono, 1995:109). Heuristik memerlukan sumber berupa buku-buku rujukan atau sumber yang dipakai sebagai landasan untuk melakukan analisis.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan arsip yang memuat tentang pendidikan karakter, sejarah pendidikan di Indonesia. Buku-buku yang menjadi data primer antara lain: *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia (1996)*, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (2020)*, dan *Sejarah Pendidikan (2012)*. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan sumber-sumber lain dari makalah, artikel, jurnal, Koran dan dokumen kebijakan pendidikan. Pencarian sumber data dilakukan dengan jalan mengunjungi

Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Malang, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Umum Kota Malang dan Arsip Daerah, pusat-pusat penjualan buku seperti Wilis, Toga Mas, Gramedia dan stand pameran buku, disamping itu juga dari koleksi pribadi.

Kedua kritik maksud dari metode ini adalah kritik terkait sumber, yang berfungsi sebagai filter secara kritis dan penilaian menyangkut otentitas dan kepercayaan terhadap sumber yang tersedia. Kritik yang dilakukan terhadap bahan materi sumber disebut kritik ekstern. Sedangkan kritik yang dilakukan terhadap substansi (isi) disebut intern (Sjamsudin, 1996:103-104).

Menurut Sjamsudin menyatakan kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan (akurasi) dari sumber itu sehingga karya sejarah yang dihasilkan merupakan produk dan proses ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan, bukan dari hasil fantasi dan manipulasi sejarawan (Sjamsudin, 1996:103).

Adanya variasi dan perbedaan sumber-sumber yang tersedia untuk penelitian ini memungkinkan peneliti menggunakan kritik internal yang menekankan pada aspek isi dari sumber primer maupun sekunder. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan isi dari masing-masing sumber dari sudut pandang keilmuan secara obyektif, kemudian mencari persamaan dari data-data tertulis pada masing-masing sumber sesuai dengan tujuan dari kajian ini. Dengan proses yang demikian, kredibilitas, hakikat dan tujuan dari keberadaan sumber dapat ditemukan, karena masing-masing sumber memiliki kriteria tersendiri untuk dinilai. Penggunaan kritik internal didasarkan pula pada metode yang dipakai yaitu metode kepustakaan. *Ketiga* interpretasi adalah pemahaman dan penjelajahan terhadap buku atau sumber yang tersedia mengakibatkan munculnya penafsiran-penafsiran baru terhadap sumber tertulis yang menyangkut arti dan suasana yang terdapat didalamnya. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bias subyektifitas (Kuntowijoyo, 2001: 102). Untuk menghindari subyektifitas dalam melakukan interpretasi, maka interpretasi dilakukan dengan hati-hati mengingat beberapa sumber yang tersedia memiliki

kelemahan dan kekurangan setelah dibandingkan dengan buku sumber lainnya. Dalam hal ini penulis skripsi berusaha bersikap lebih objektif karena masing-masing penulis sumber yang ada mempunyai objektivitas yang berbeda-beda.

Interpretasi dilakukan pada buku-buku, Koran, jurnal, majalah serta dokumen-dokumen tentang kebijakan pendidikan. Selain itu juga dari pendapat para tokoh dan pakar pendidikan yang dapat dihubungkan dan menjadi kesimpulan yang terkait dengan karya ilmiah ini. Sebab dari itu penulis berharap dapat menghasilkan “ramuan” yang cocok untuk dikonsumsi seluruh kalangan yang membutuhkan referensi terkait pembahasan karya ilmiah ini.

Keempat adalah Historiografi cara ini memerlukan pemikiran analisis secara kritis untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu sintesis dari seluruh penelitiannya didalam penulisan yang utuh. Rekonstruksi terhadap peristiwa masa lampau berdasarkan data yang diperoleh disebut historiografi (Gotsschalk, 1975:32). Dalam historiografi, model penulisan yang dipakai adalah model deduktif. Deduktif adalah penulisan yang bersifat umum menuju khusus. Sebagai peneliti, persoalan historiografi ditekankan pada kemahiran penulisan dengan gaya bahasa yang dipakai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan nasional pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yakni masa awal kemerdekaan yang lebih dikenal dengan masa Orde lama (1945-1965), tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial politik yang ada. Karenanya transisi kebijakan pendidikan nasional pada masa ini dapat dibagi dalam tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya, yaitu: *fase pertama*, sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-undang Pendidikan No.4 Tahun 1950; *fase kedua*, dari akhir fase pertama sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959 atau dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal atau Parlementer (1951-1959); *fase ketiga*, dari akhir fase

kedua sampai berakhirnya masa demokrasi terpimpin (1959-1965) dan keseluruhan fase tersebut tergolong dalam orde lama (Assegaf, 2005: 54).

Pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden, dengan dekrit ini secara tidak langsung memperkuat posisi Presiden dan memperlemah parpol, Era kehidupan ini dikenal dengan era Manifesto Politik atau manipol. Dan tentunya manipol ini juga berpengaruh terhadap Pendidikan Nasional karena, *Pertama*, dari sisi ideologi. Manipol ini di indoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk pada semua jenjang Pendidikan, sehingga tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran lain selain dari apa yang telah dirinci oleh pemerintah. *Kedua*, dari sisi kebijakan pendidikan, asas pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol USdek. Adapun tujuan pendidikan nasional pada fase ini adalah untuk melahirkan warga-warga sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a). Ketuhanan Yang Maha Esa; (b). Perikemanusiaan yang adil dan beradab; (c). Kebangsaan; (d). Kerakyatan; dan (e). Keadilan sosial seperti dijelaskan dalam Manipol USDEK. (Djojonegoro,1996:103).

Untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan Manipol, maka Menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan telah menyusun rencana jangka pendek yang kemudian akan disusul dengan rencana jangka panjang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rencana jangka pendek disusunlah rencana yang disebut Sapta Usaha Tama (Tilaar,1995:103) . Sapta Usaha Tama berisi:

a. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K

Yang dimaksud dengan penertiban dan usaha-usaha kementerian PP dan K adalah (1) semua sekolah harus dimulai dan diakhiri pada waktu yang telah ditentukan; (2) Semua guru dan murid bertanggung jawab atas kebersihan sekolah; (3) Tiap-tiap hari senin sekolah mengadakan upacara

menaikan bendera kebangsaan berupa, menaikkan bendera, memberi hormat kepada bendera, mengucapkan sumpah pemuda, pidato kepala sekolah atau guru; (4) Hari terakhir tiap pekan setelah jam pelajaran terakhir diadakan upacara penurunan bendera; (5) Hari-hari nasional harus diperingati dengan upacara menaikkan bendera dan memberi hormat kepada bendera, kemudian mengheningkan cipta, menyanyikan lagu Indonesia raya dan sambutan kepala sekolah atau guru.

b. Menggiatkan kesenian dan olah raga

Dengan menggiatkan kesenian dan olahraga maka diwajibkan kepada murid untuk mempelajari dan dapat menyanyikan lagu-lagu nasional: Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Maju tak Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa, Sang Merah Putih, Garuda Pancasila. Kemudian dalam bidang olahraga harus diadakan pertandingan-pertandingan dan perlombaan untuk mengasah potensi siswa dalam segala bidang olahraga. Yang tidak boleh ketinggalan adalah harus memajukan dan mengembangkan kesenian daerah dan nasional.

c. Menggiatkan “usaha halaman”

Yang dimaksud dengan usaha halaman ialah segala usaha yang dapat dilakukan di halaman sekolah dan rumah, yang hasilnya dapat membantu “sandang pangan”. Meliputi penanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan, juga peternakan, perikanan dan kerajinan tangan.

d. Mengharuskan penabungan

Dengan adanya instruksi ini maka tiap murid diwajibkan untuk menabung demi kebutuhan mereka dimasa mendatang, akan tetapi jumlah uang tabungan harus disesuaikan dengan kemampuan orang tua murid dan tidak boleh menjadi beban yang memberatkan.

e. Mewajibkan usaha-usaha koperasi

Kegiatan ini harus dimulai dengan uang pangkal dari anak-anak sendiri kemudian yang menjadi pengurus adalah murid-murid sendiri,

guru-guru akan menjadi penasehat dan pengawas, akan tetapi penyimpanan uangnya harus dilakukan oleh guru yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Dalam koperasi itu ada barang-barang yang perlu dijual atau dibeli yang berupa: makanan, alat-alat sekolah, pakaian seragam, sepatu, sabun dan tentunya alat-alat perlengkapan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan murid.

f. Mengadakan kelas masyarakat

Tujuan untuk mengadakan kelas masyarakat ini adalah mempersiapkan para lulusan sekolah rakyat memperoleh kecakapan atau keterampilan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan dan industri kecil, sehingga dapat berdiri sendiri dan dapat berguna bagi masyarakat. Dan untuk lama belajarnya kurang lebihnya selama dua tahun

g. Membentuk 'regu kerja' di kalangan SLA dan Universitas

Sebagai langkah usaha melaksanakan Sapta Usaha Tama ini jawatan pendidikan umum membentuk suatu urusan khusus yang disebut urusan Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana atau yang lebih dikenal dengan lima prinsip perkembangan pendidikan. Apabila Sapta Usaha Tama mengurus pelaksanaan ketujuh prinsip di atas tersebut di sekolah-sekolah, maka Pancawardhana mengusahakan berjalannya sistem pendidikan baru yang meliputi: (1) Perkembangan kecerdasan; (2) Perkembangan moral nasional; (3) Perkembangan artistik emosional; (4) Pengembangan skill; (5) Perkembangan fisik (kesehatan/jasmani).

Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 tanggal 17 Agustus 1961, diadakan perincian yang lebih lanjut mengenai Pancawardhana. Bahwa untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan manipol maka di instruksikan dan menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan yang berisi prinsip-prinsip: (a) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan; (b) perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan emosional artistik atau rasa

keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan *keprigelan* atau kerajinan tangan; dan (e) perkembangan jasmani. Sejak saat itu seluruh kegiatan sekolah baik yang kurikuler maupun yang ekstrakurikuler banyak berubah dan harus menyesuaikan dengan intruksi diatas. Berdasarkan segi materi pelajaran di sekolah, Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi (Ahmadi, 1987:9).

Tujuan dari sistem pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip pancawardhana adalah membentuk manusia sosialis Indonesia berdasarkan cipta, rasa, karsa, dan karyanya pada azas-azas sebagai berikut: (1) kepribadian dan kebudayaan Indonesia; (2) semangat patriot komplit dan paripurna; (3) berasas pancasila; (4) bersemangat gotong royong; (5) memiliki jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia susila dan berbudi luhur; (7) kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran; (8) kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11) mengenal asas demokrasi terpimpin; (12) mengenal asas ekonomi terpimpin; (13) berdisiplin; (14) memiliki kepandaian untuk menghargai waktu; (15) cara berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja untuk membangun dengan bekerja keras (Assegaf, 2005: 81).

Selama periode pemerintahan orde baru, pemerintahan ini punya program kerja yang lebih dikenal dengan program kerjanya Pembangunan Jangka Panjang (PJP I) fokus perhatian yang dilakukan oleh Orde Baru ada empat tahap strategi politik.dan semuanya berpengaruh langsung dengan kebijakan pendidikan nasional, yaitu: *pertama*, penghancuran PKI beserta ideologi Marxisme dari kehidupan politik bangsa, serta membersihkan semua lembaga dan kekuatan sosial-politik dari kader-kader PKI dan proses penghilangan pengaruh Nasakom pada seluruh aspek kehidupan bangsa; *kedua*, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945; *ketiga*, menghapuskan atau menghilangkan dualisme kepemimpinan nasional;

keempat, mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan pembangunan (Djojonegoro, 1996: 149).

Berdasarkan UU No.2 Tahun 1989, pembangunan pendidikan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya dan mampu mandiri, serta memberikan dukungan perkembangan kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh dan mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sistem Pendidikan Nasional merupakan alat dan tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan serta tujuan negara dan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar, dalam sistem pendidikan nasional tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dalam penerimaan murid baru (Djojonegoro, 1996:155).

Strategi pembangunan nasional yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi krisis secara global maupun regional. Karena kurangnya kebijakan pendidikan itulah yang menyebabkan penyediaan kualitas sumber daya manusia kurang mempunyai keunggulan kompetitif dalam skala global. Dalam era reformasi, sektor pendidikan perlu difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa agar memiliki keunggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global (Darmaningtyas, 2005: 37).

Undang-undang sisdiknas ini juga memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Suyanto, 2000: 15).

Kurikulum

Kurikulum adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, kurikulum telah mengalami banyak perubahan, yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Fokus utama yang diambil penulis adalah kurikulum yang berlaku pada awal kemerdekaan atau pada masa orde lama.

Susunan rencana pendidikan sekolah dasar tahun 1964 masih sederhana, yaitu mencakup unsur pokok garis-garis besar susunan program pengajaran pada rencana pendidikan tahun 1964, yaitu: *Pertama*, mata pelajaran atau bidang studi dikelompokkan sesuai dengan pancawardhana menjadi lima kelompok bidang studi, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional-artistik, keprigelan/keterampilan, dan jasmaniah. *Kedua*, susunan tiap wardhana adalah uraian pendahuluan tentang komposisi, tujuan kurikuler yang hendak dicapai, tiap bidang studi dibagi menurut kelas. Tiap tujuan intruksional disertai bahan-bahan yang diajarkan dan petunjuk praktis dalam memilih dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kurikulum SMP yang berlaku pada masa itu adalah kurikulum 1962 yang disebut juga rencana pelajaran SMP Gaya Baru dengan pengelompokan mata pelajaran dalam rencana pelajaran yang disusun dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: *Kelompok Dasar* adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berjiwa patriot paripurna serta sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani; *Kelompok Cipta* adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sehingga dapat mewujudkan tenaga kejuruan yang ahli; *Kelompok Rasa/Karsa* adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan membiasakan anak didik memenuhi tuntutan social masyarakat Indonesia supaya anak didik cinta kepada keindahan; *Krida* adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memupuk minat, bakat, dan kemampuan (Djojonegoro, 1996: 128).

Selama masa pemerintahan Orde Baru perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat banyak telah meningkatkan kadar pendidikan penduduk Indonesia, karena pendidikan adalah motor penggerak dari transformasi sosial yang sangat dahsyat. Dalam bidang pendidikan kita memerlukan sistem yang baik dan bagus bukan saja yang dapat menghasilkan manusia Indonesia yang pintar tetapi juga bermutu sehingga bisa mengikuti perubahan-perubahan kehidupan akibat pertumbuhan ekonomi, kemajuan iptek, dan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai. Sehingga dalam hal ini kurikulum sangat jelas dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. Didalam salah satu bukunya H. A. R. Tilaar (1995: 257) mengatakan bahwa Selama pemerintah Orde Baru berkuasa ada empat kali kurikulum yang berlaku yang tentunya masing-masing kurikulum tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda antara lain seperti: *pertama* Kurikulum 1968 dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru maka sesuai dengan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Isi pendidikan adalah

mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Semua sekolah asing dilarang di seluruh Indonesia dan pemerintah memperhatikan perkembangan gerakan pramuka, inilah isi dari kurikulum 1968; *kedua* Kurikulum 1975 usaha untuk memperbaiki kurikulum pendidikan sudah lama dirasakan kebutuhannya oleh pemerintah, untuk meningkatkan mutu pendidikan banyak dilaksanakan berbagai percobaan, misalkan mendirikan Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran (BP4) yang sejak tahun 1951 mengadakan sekolah-sekolah percobaan. Usaha yang kedua adalah pembaharuan kurikulum dan metode mengajar, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta; bahasa sunda di Bandung; kesenian di Yogyakarta; IPS di Surabaya; IPA di Malang; dan sekolah laboratorium IKIP Malang yang di pimpin oleh Prof. Dr. Supartinah Pakasi inilah merupakan salah satu masukan untuk kurikulum 1975. Dalam pelita I ini menteri pendidikan mengemukakan *basic memorandum* tentang pendidikan yang diantaranya berisikan, sekolah itu hendaknya berorientasikan kepada pembangunan dan pengajaran, sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan, dan keterampilan untuk pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang. Sekolah hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar dan program yang menyenangkan, menantang dan cocok dengan tujuannya; *ketiga* Kurikulum 1984 Semakin pesatnya pembangunan nasional juga melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pendidikan nasional. Seperti yang telah digariskan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan kebijakan pendidikan nasional mempunyai tiga ciri: (1) *Semesta*, artinya meliputi semua unsur kebudayaan yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual; (2) *Menyeluruh*, artinya pendidikan untuk sumbu hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah; (3) *Terpadu*, artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam system pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan yang

lain adalah bahwa pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan, sehingga kebudayaan perlu mendapatkan tempat dalam kurikulum pendidikan, agar dapat menyeimbangkan antara kemampuan intelektual dengan pendidikan moral dan estetika; *keempat* Kurikulum 1994 kurikulum ini mulai berlaku secara bertahap sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1989 dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya. Kurikulum ini disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan. Landasan pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran. Kurikulum yang dikembangkan era reformasi *pertama Kurikulum Berbasis Kompetensi* pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* yang telah ditetapkan. *Competency Based Education is education geared toward preparing individuals to perform identified competencies* (Assegaf, 2005:165). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa mendatang, maka pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi. *Kompetensi* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Mulyasa, 2003: 37). Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah: (1) kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks; (2) kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten; (3) kompeten merupakan hasil belajar (*learning outcomes*) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran; (4) kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur (Hamalik, 1990: 12).

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya (dakir, 2004: 15).

Berdasarkan penjelasan di atas, kurikulum berbasis kompetensi juga mempunyai karakteristik yang sangat kuat terhadap perkembangan kompetensi, baik guru maupun peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gordon dalam (Effendi, 2009: 102) karakteristik tersebut antara lain: (1) pengetahuan atau *knowledge* yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan dan bagaimana

melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya; (2) pemahaman atau *understanding* yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien; (3) kemampuan atau *skill* adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk member kemudahan belajar kepada peserta didik; (4) nilai atau *value* adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku atau karakter dalam pembelajaran yaitu kejujuran, keterbukaan, toleransi, demokratis dan tanggung jawab; (5) sikap atau *attitude* yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar; (6) minat atau *interest* adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Kedua Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis menjadi petunjuk dan pedoman kegiatan di kelas, yang mana rencana atau program tersebut merupakan akumulasi semua pengalaman yang dihadapi anak di bawah pengarahan sekolah. Seperangkat rencana di bawah pengarahan sekolah tersebut mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakter, kondisi dan potensi daerah. Oleh karena itu, di usia 14 tahun era reformasi ini pemerintah menyusun kurikulum untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Panduan pengembangan kurikulum ini disusun agar dapat

memberi kesempatan peserta didik untuk: (1) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mempunyai karakter religius; (2) belajar untuk memahami dan menghayati atau mempunyai karakter toleransi, peduli lingkungan dan peduli sosial; (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif atau mempunyai karakter jujur, mandiri dan disiplin; (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain atau mempunyai karakter toleransi, demokratis dan komunikatif.

Tujuan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah mengacu pada tujuan umum pendidikan. Tujuan pada pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk materi penanaman nilai karakter siswa dimasukkan kedalam semua mata pelajaran yang ada (Mulyasa, 2007: 23).

Kesimpulan dan Saran

Revolusi nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan. Dengan ini maka tercapailah kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mematahkan belenggu penjajahan dan menimbulkan hidup baru didalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan, dirasakan perlu merubah system pendidikan yang sesuai dengan suasana baru atau sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan kaum penjajah lagi.

Semua aspek pendidikan didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dalam pasal 31 yang mengatur tentang hal pendidikan ayat (1) Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh sebab itulah tidak boleh ada aturan tentang pendidikan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan memang tidak terlepas dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Didalam perjalanan perjuangan kebangsaan Indonesia terlihat hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan perjuangan nasional. Pada masa kebangkitan nasional pertama, pendidikan nasional menyatu dengan gerakan kebangsaan, sehingga pendidikan nasional bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan jiwa patriotism berdasarkan Manipol USDEK. Dan menetapkan Pancawardhana sebagai system pendidikan yang berisikan prinsip: (a) Cinta bangsa dan tanah air, moral national/ internasional/ keagamaan; (b). perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan; (e) perkembangan jasmani.

Ketika tampuk pemerintahan dipegang oleh Orde Baru maka bidang pendidikan pun tidak lepas dari perhatiannya yaitu Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kebijakan pendidikan nasional mempunyai tiga cirri: (1) *Semesta*, artinya meliputi semua unsur kebudayaan yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual; (2) *Menyeluruh*, artinya pendidikan untuk sumur hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah; (3)

Terpadu, artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam system pendidikan nasional.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut termaktub dalam Bab II pasal 2 yang berbunyi “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Reformasi pendidikan tidak hanya menjadikan pendidikan sebagai isu utama saja tetapi harus mampu mengimplementasikan dan menyangkut substansi pendidikan itu sendiri. Pendidikan disini dimaknai sebagai proses budaya yang akan membentuk karakter bangsa menjadi lebih beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kepekaan sosial, solidaritas, dan anti kekerasan.

Panduan pengembangan kurikulum disusun agar dapat member kesempatan peserta didik untuk: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mempunyai karakter religious; (2) belajar untuk memahami dan menghayati atau mempunyai karakter toleransi, peduli lingkungan dan peduli sosial; (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif atau mempunyai karakter jujur, mandiri dan disiplin; (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain atau mempunyai karakter toleransi, demokratis dan komunikatif.

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis menyarankan agar generasi muda terutama yang masih berada dalam proses pendidikan baik secara formal maupun informal untuk mempelajari dan memahami pendidikan karakter di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda penerus bangsa memahami nilai-nilai karakter dan tidak tercerabut dari akar kebudayaannya sendiri.

Penulis juga menyarankan agar para generasi muda mampu mengaplikasikan nilai-nilai karakter yang telah diajarkan oleh tokoh-tokoh bangsa sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga mereka benar-benar mengerti dan faham akan pentingnya nilai-nilai karakter itu bagi dirinya dan orang lain.

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi di era globalisasi ini para siswa dituntut untuk bisa mengikuti perkembangannya, akan tetapi juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai adat atau karakter budaya bangsa itu sendiri. Supaya nilai-nilai itu tetap tumbuh subur dalam budaya kehidupan sehari-hari.

Daftar Rujukan

- Amri, Sofan dkk. 2011. *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ahmadi, A. 1987. *Pendidikan Dari Masa ke Masa*. Bandung: Armico.
- Assegaf, Abd, R. 2005. *Politik Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kurnia Salam.
- Akbar, Sa'dun. 2011. *Revitalisasi Pendidikan karakter di Sekolah Dasar*.
Makalah disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM, Malang, 8 Juni.
- Dakir, H. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-rusakan*. Yogyakarta: LKiS.
- Djojonegoro, Wardiman. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Effendi, Mohammad. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka jaya.
- Hidayatullah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan*. 2004. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah (Cetakan ke empat)*. Jakarta: yayasan Benteng Budaya.

- Mulyasa, E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. 1990. *Pengembangan Kurikulum, Dasar-dasar dan Pengembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Renier. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, dkk. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tilaar, H.A.R., 1995. *Lima Puluh Tahun Pengembangan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

**PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH SEJAK PROKLAMASI
KEMERDEKAAN SAMPAI ERA REFORMASI**

ARTIKEL

Oleh:

ABD MU'ID ARIS SHOFA

NIM 108811410312



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Januari, 2012**